

## **ABSTRACT**

Emmanuel Pogolamun, 2024. **THE POSITION OF A WIDOW WITHOUT DESCENDANTS IN INHERITANCE ACCORDING TO THE CIVIL CODE.** Supervised by Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H and Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Inheritance occurs when someone passes away, leaving behind wealth, leading to disputes within the family regarding the inheritance of the deceased's assets. In cases of inheritance disputes between a widow without descendants and other heirs based on blood relations, there is a need for legal regulations that govern and bind the parties involved, as well as the application of sanctions for violators, ensuring that the inheritance process proceeds smoothly without harming others. The Civil Code also regulates the elements of inheritance law, including the testator, heirs, and inherited assets that the testator will bequeath to their heirs. The purpose of this research was to determine the position of a widow without descendants regarding her husband's inheritance under the Civil Code, and to understand her inheritance rights according to the Civil Code. This research used a normative legal method, drawing on secondary data collected from literature sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to the research topic. To form a national inheritance law that aligns with the values of Indonesian society, it is suggested that lawmakers create regulations (laws) that provide a place for widows not only in intestate inheritance but also in testamentary inheritance. Considering the role and responsibilities of a wife in domestic life, a wife or widow without descendants should have the same status as a child as a first-class heir.

Keywords: **Wealth, Widow, Marriage**

## ABSTRAK

Emmanuel Pogolamun, 2024. **KEDUDUKAN MEWARIS JANDA TANPA KETURUNAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H dan Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.**

Pewarisan terjadi karena adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka akan timbul perselisihan dalam keluarga tersebut dalam hal memperebutkan harta warisan dari si pewaris. Dalam hal penanganan sengketa perkara warisan antara seorang janda tanpa anak dan ahli waris lainnya berdasarkan hubungan darah, maka perlu adanya peraturan hukum yang mengatur dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa dan juga penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sehingga dengan demikian setiap proses pewarisan dapat berjalan dengan baik tanpa harus merugikan pihak lain. KUHPerdato juga mengatur tentang unsur-unsur yang termasuk dalam hukum waris, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan sebagai harta yang akan dilimpahkan pewaris kepada ahli warisnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan janda tanpa keturunan terhadap harta warisan suami menurut KUHPerdato, dan untuk mengetahui kedudukan mewaris janda tanpa keturunan menurut KUHPerdato. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang datanya bersumber dari data sekunder dan dalam pengumpulan datanya bersumber dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan judul penelitian. Untuk membentuk hukum waris nasional yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia, kiranya para pembentuk undang-undang membuat suatu peraturan (UU) yang memberi tempat bagi janda tidak hanya dalam pewarisan ab- intestato tetapi juga dalam pewarisan testamentair. Mengingat tugas dan peran seorang istri dalam kehidupan berumah tangga, sehingga seorang istri atau janda tanpa anak juga dapat memiliki kedudukan yang sama dengan seorang anak sebagai ahli waris golongan pertama.

Kata Kunci: **Harta, Janda, Perkawinan**